



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.21/PPKL/SET/KUM.1/10/2018
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa industri sektor Pertambangan Batu Bara merupakan salah satu sektor industri peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka penilaian hijau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan perlu ditetapkan acuan dalam melakukan benchmarking bagi industri sektor Pertambangan Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Benchmarking Sektor Industri Pertambangan Batu Bara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG BENCHMARKING PENILAIAN HIJAU PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN BATU BARA.

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Kegiatan pertambangan batu bara adalah serangkaian kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan/pencucian batu bara.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada:

- a. peserta Proper sektor industri pertambangan batu bara dalam melaksanakan benchmarking; dan
- b. penilai Proper dalam melakukan penilaian kinerja lebih dari ketaatan.

Pasal 3

- (1) Benchmarking yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri dari:
 - a. benchmarking intensitas energi;
 - b. benchmarking intensitas emisi;

- c. benchmarking intensitas air;
 - d. benchmarking intensitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - e. benchmarking intensitas limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Acuan dalam melakukan:
- a. benchmarking intensitas energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I;
 - b. benchmarking intensitas emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II;
 - c. benchmarking intensitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III;
 - d. benchmarking intensitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dominan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - e. benchmarking intensitas limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Hasil benchmarking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penilaian kriteria benchmarking penilaian hijau Proper.
- (2) Bagi industri pertambangan batu bara yang akan melaksanakan benchmarking kinerja pada level dunia, harus memiliki kinerja yang berada pada rentang 25% terbaik dari acuan benchmarking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

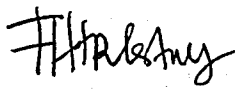
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 2 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK

DIREKTUR JENDERAL,



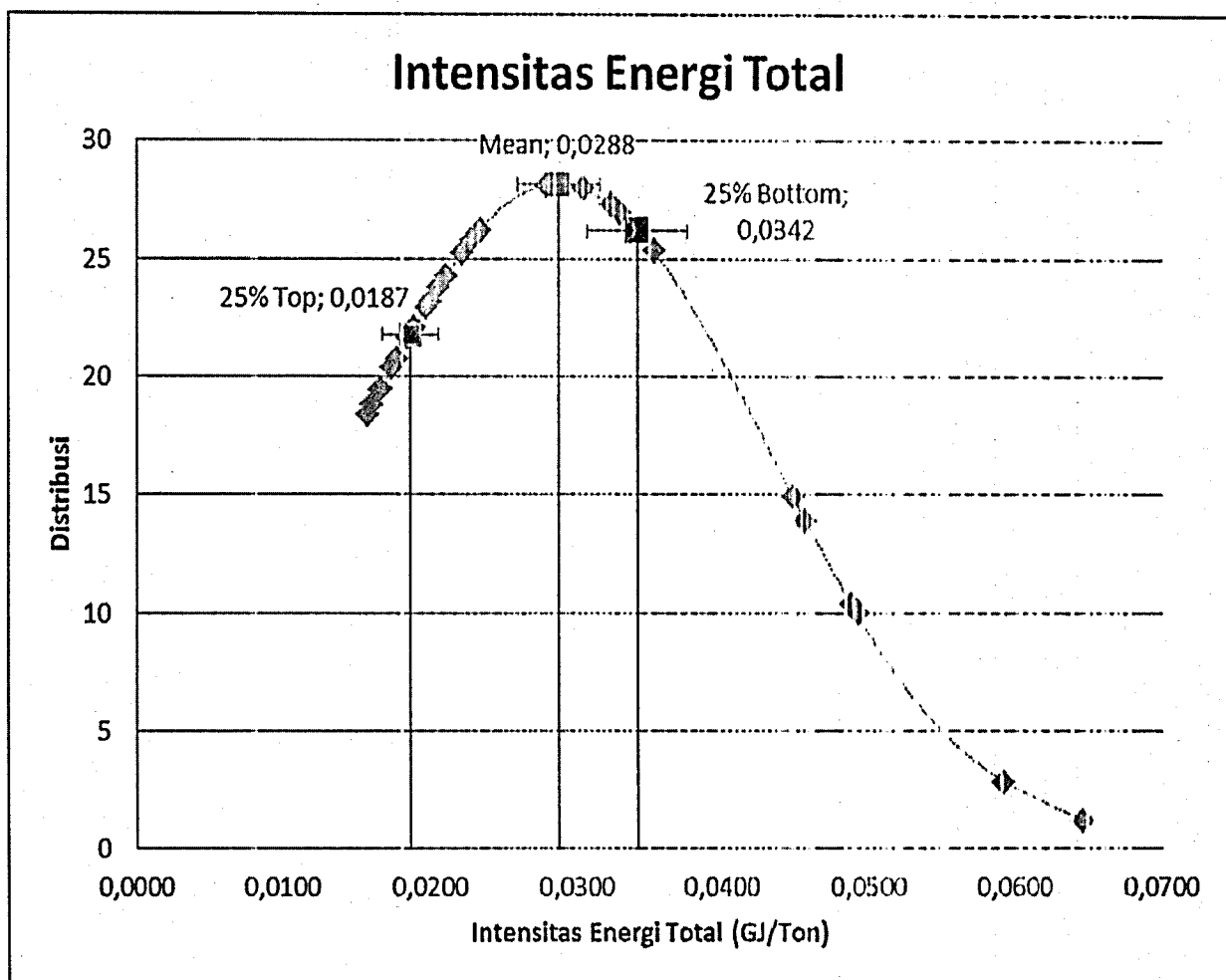
FITRI HARWATI

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.21/PPKL/SET/KUM.1/10/2018
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN
BATU BARA

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS ENERGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK

FITRI HARWATI

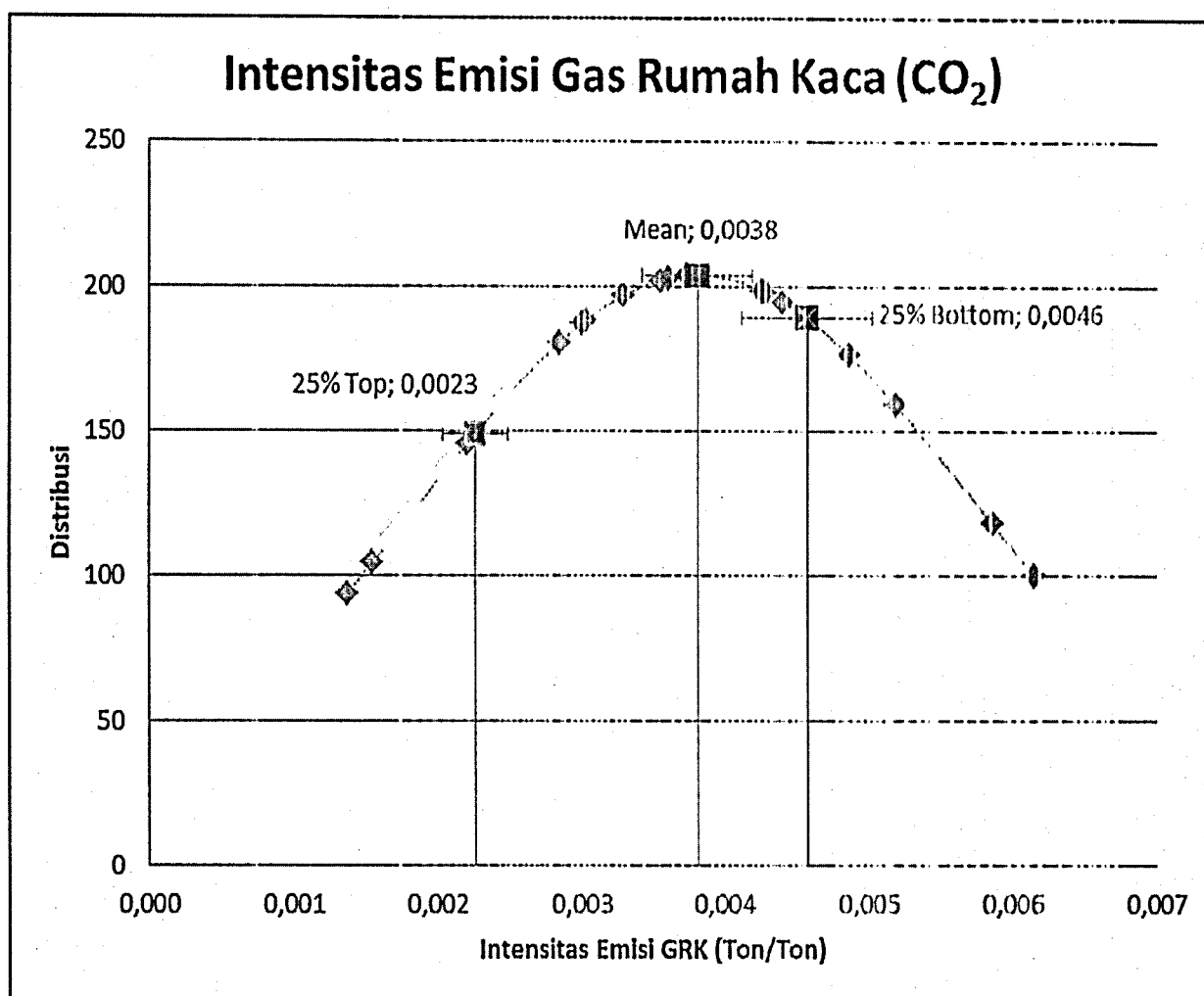
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.21/PPKL/SET/KUM.1/10/2018
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN
BATU BARA

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK

FITRI HARWATI

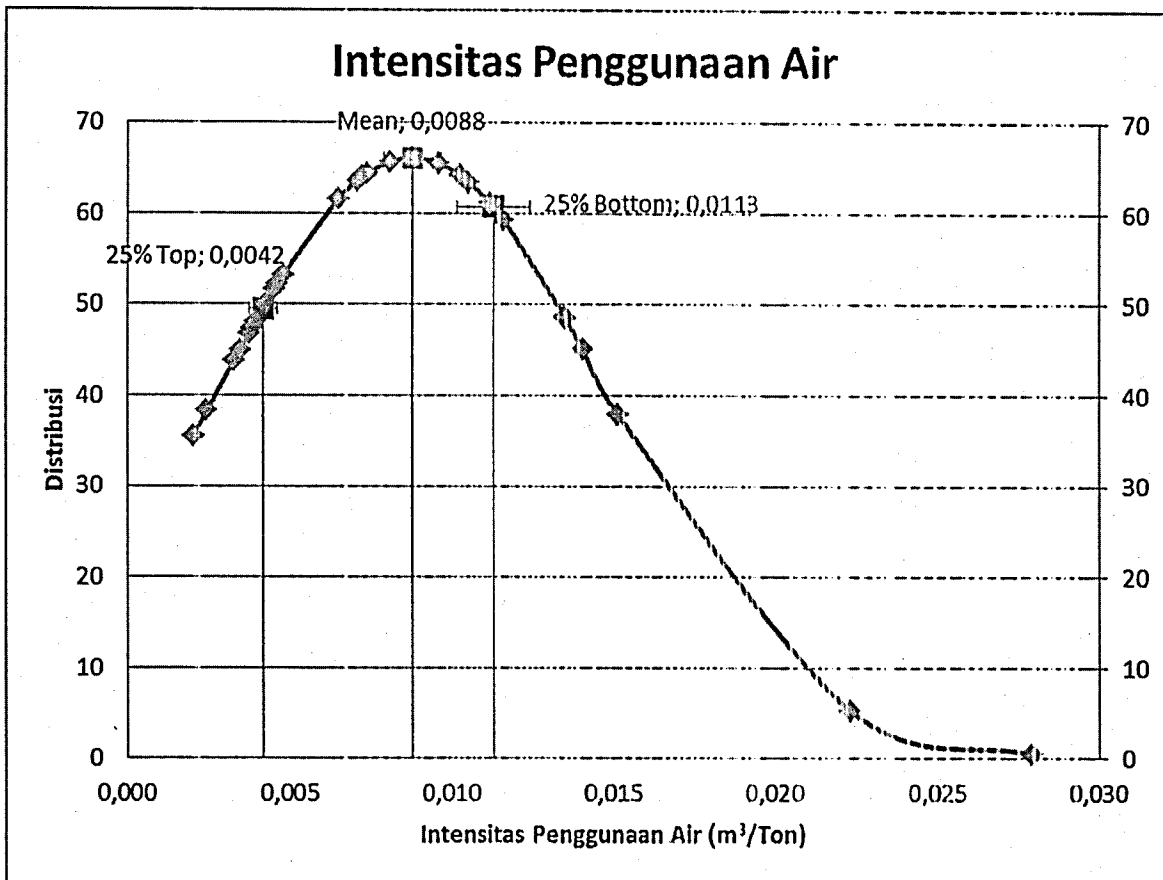
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.21/PPKL/SET/KUM.1/10/2018
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN
BATU BARA

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS AIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK

FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN IV

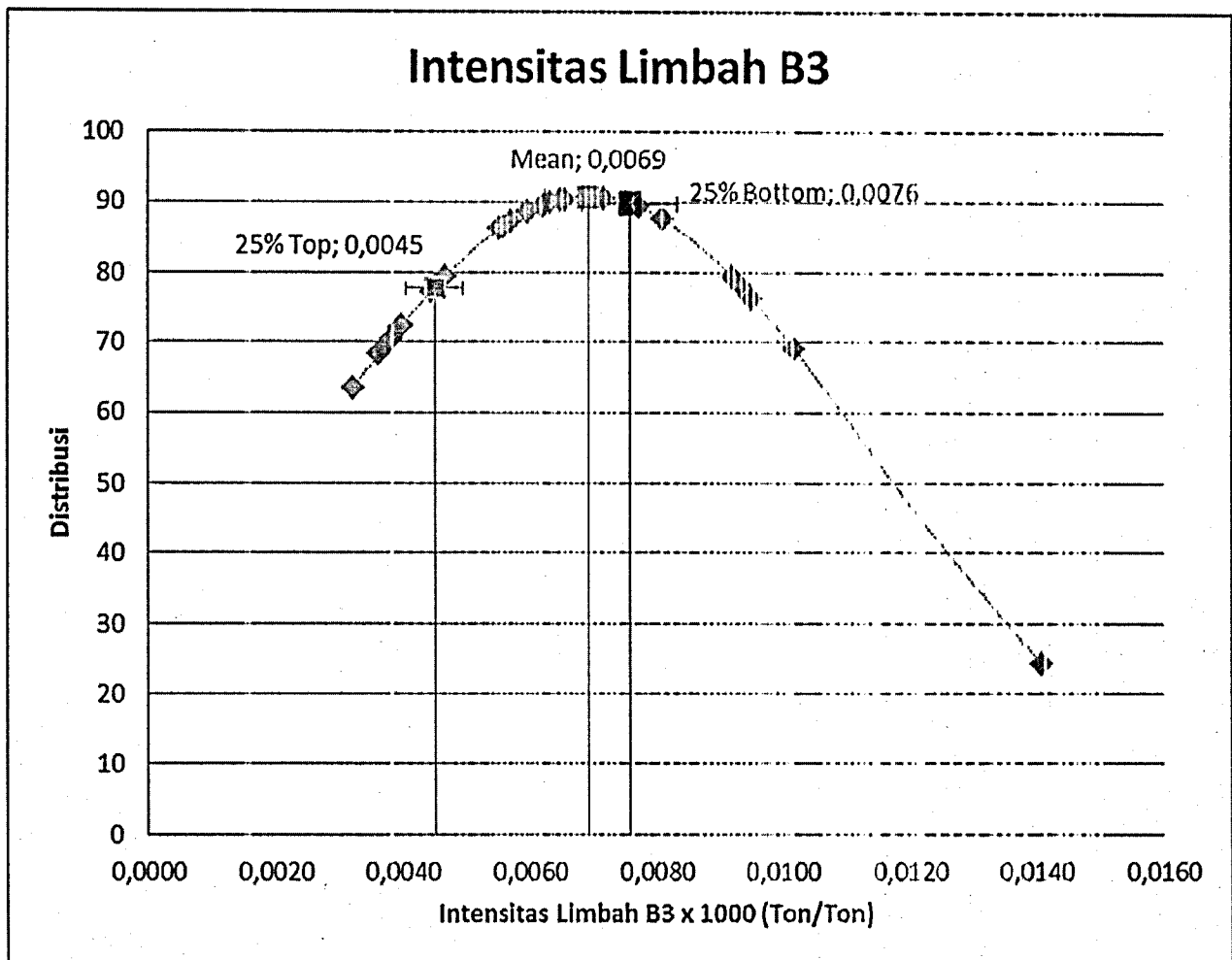
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P.21/PPKL/SET/KUM.1/10/2018

TENTANG

BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN
BATU BARA

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK


FITRI HARWATI

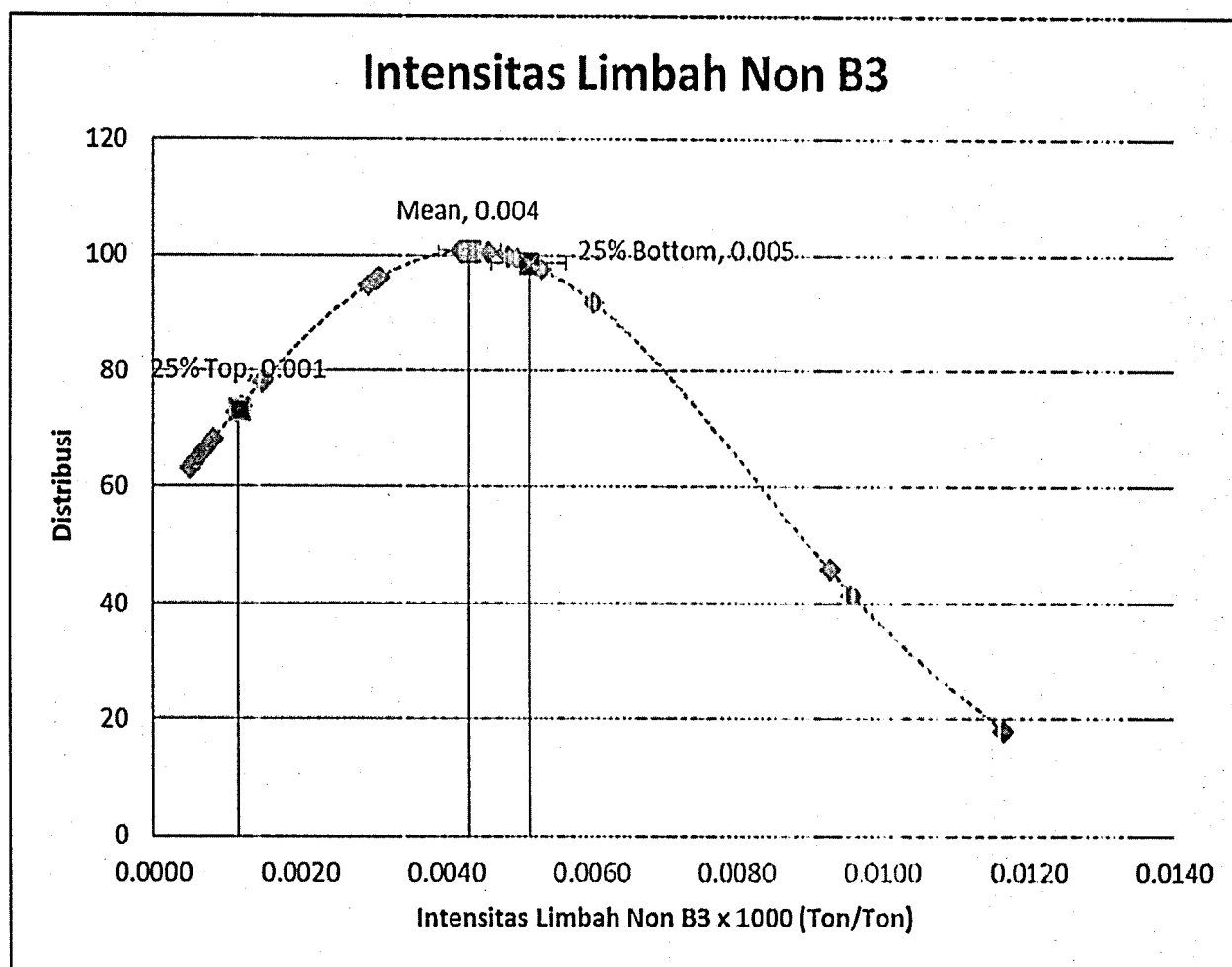
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.21/PPKL/SET/KUM.1/10/2018
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN
BATU BARA

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS LIMBAH NON BERBAHAYA DAN
BERACUN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK

Fitri Harwati

FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH